BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi atau kepentingan rakyat. Dalam kaitannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, fungsi refresentatif yang mereka miliki diimplementasikan melalui No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu bahwa DPRD memiliki tugas wewenang untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. Selain itu DPRD memiliki kewajiban bahwa DPRD memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. [1]

Tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Provinsi Jawa barat, yaitu DPRD memiliki tugas dan fungsi dalam menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Selain itu, dalam menindaklanjuti pemenuhan aspirasi masyarakat, tidak lepas dari aktivitas peranan struktur, prosedur dalam kerangka sistem pemerintahan daerah, juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi, bagaimana menampung dan mengartikulasi aspirasi masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi antar unit kerja agar tercipta suatu sistem pemenuhan

[1] *Panduan Pelaksanaan Tugas Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Jawa Barat 2012*

aspirasi dalam prosedur sistem pemerintahan daerah, yang umpan baliknya dapar diketahui dan dirasakan oleh masyarakat dan yang tidak kalah penting adalah integritas dan kemampuan anggota DPRD dalam memahami dan menampung keinginan rakyat.

Namun di sisi lain, harus diakui bahwa sosialisasi politik yang dilakukan oleh lembaga wakil rakyat tersebut belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, yang karenannya banyak anggota masyarakat tidak mengerti akan fungsi DPRD yang sebenarnya. Mereka sering beranggapan bahwa DPRD tidak boleh tidak harus menyelesaikan seluruh masalah yang mereka miliki, padahal kewajiban DPRD sebatas memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Baik suatu perusahaan ataupun instansi pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari dukungan manajemen yang di dalamnya termasuk seorang praktisi Hubungan Masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh Humas & Protokoler. Humas & Protoker memiliki Sub Bagian-Sub Bagian diantaranya Sub bagian Layanan Aspirasi yang mempunyai tugas pokok menyelengarakan layanan hubungan DPRD dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta memfasilitasi layanan aspirasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Layanan Aspirasi di bawah naungan Divisi Humas & Protokoler mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan layanan hubungan DPRD dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan instansi penerintah maupun swasta;
b. Penyelenggaraan layanan penerimaan aspirasi dan penyeluran aspirasi ke DPRD
c. Monitoring tanggapan masyarakat terhadap kegiatan DPRD dan mengantisipasi dampak serta perubahannya.

Hubungan Masyarakat merupakan wakil dari suatu instansi atau perusahaan. Seperti definisi Humas yang disampaikan oleh Dr. Rex Harloe (1978) dari Fransisco, Amerika, yang menyatakan sebagai berikut :

> "Humas merupakan komunikasi dua arahantara organisasi/ instansi dengan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama"(Ruslan, 2012:130).

Sebagai pengaruh globalisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya reformasi yang berawaldari krisis moneter dan ekonomi yang mendorong semangat partisipasi politik rakyat yang menampilkan konsep demokrasi dan transparansi setelah mengalami perubahan yang sangat mendasar yang ditandai dengan berakhirnya orde baru, membawa berbagai pengaruh perubahan, baik perubahan positif maupun perubahan negatif.

Hal-hal positif antara lain terbukanya aspirasi politik, terbukanya kemerdekaan pers, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul yang bermuara pada peningkatan partisipasi rakyat secara signifikan. Sedangkan hal-hal negatif antara lain timbulnya euphoria politik pada diri masyarakat yang tidak diimbangi oleh pendidikan politik. Hal tersebut

menyebabkan sikap arogansi masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap wakilnya di lembaga legislatif.

Kini seiring bergantinya sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi, maka masyarakat sudah bebas untuk beraspirasi dan mengespresikan tuntutan terhadap pemerintah. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Dengan melihat fenomena tersebut, Humas khususnya Humas pemerintahan dituntut untuk menjalankan strateginya dengan baik.

Salah satu ciri partisipasi politik rakyat antara lain adanya input yang berbentuk aspirasi masyarakat yang secara tekhnis dapat dikatakan sebagai tuntutan dan dukungan. Aspirasi merupakan ungkapan ketidakpuasan atau keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, kritikan, harapan, masukan dan saran.

Masyarakat pada umumnya berhak menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan hal – hal mengenai pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan daerah. Namun, karena banyaknya aspirasi yang masuk sehingga pemerintah mendapatkan kesulitan dalam penyampaian untuk menanggapi aspirasi – aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Dalam menyampaikan aspirasinya, masyarakat umumnya mengaspirasikan melalui demonstrasi. Demonstrasi unjuk rasa atau demo merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Demo atau unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok penentang

kebijakan atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik dari kepentingan suatu kelompok.

Bagi penguasa, demo atau unjuk rasa ini bukanlah kebiasaan baik, karena dapat mengurangi kewibawaan pemerintah di masyarakat. Terdapat dua bentuk aspirasi dilihat dari bentuk penyampaiannya, yaitu aspirasi langsung dan aspirasi tidak langsung. Aspirasi langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung tanpa perantara, seperti aksi unjuk rasa dimana aksi ini terkadang menjadi sangat tidak terkontrol karena tidak adanya tanggapan atau tindaklanjut yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti aksi bakar – membakar, merusak gedung maupun aksi-aksi lain yang merugikan banyak pihak.

Sedangkan aspirasi tidak langsung merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui media, seperti surat yang dikirimkan kepada pemerintah, email yang dikirimkan melalui website dan lain sebagainya. Kedua aspirasi ini merupakan salah satu saluran dari proses komunikasi dalam cara menyampaikan pesan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan publik.

Berkaitan dengan paparan diatas, pada tanggal 01 Mei merupakan hari peringatan Buruh sedunia, atau lebih dikenal dengan “Mayday”. Mayday selalu diperingati dengan turunnya seluruh buruh di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan kaun buruh di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2013, atau yang dikenal dengan sebutan Mayday, sejumlah elemen buruh dan serikat pekerja menyiapkan berbagai tuntutan. Aksi demo pun bakal dilakukan di berbagai daerah secara serentak pada hari tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Said Iqbal, pada acara diskusi publik bertema "Peringatan May Day, Momentum Peningkatan Kesejahteraan Buruh" mengemukakan, demonstrasi buruh pada peringatan Hari Buruh itu akan menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kutipan wawancara pada salah satu media cetak Suara karya.

Globalisasi kerapkali diidentikkan dengan ketidakadilan yang salah satunya dirasakan oleh kaum buruh terutama yang bekerja di negara miskin dan berkembang. Globalisasi bagaimanapun juga membawa isu kapitalisme menjadi global, sehingga permasalahan mengenai perburuhan menjadi global pula. Permasalahan mengenai perburuhan dan kapitalisme global ini sudah lama disuarakan oleh Karl Marx yang mana menginginkan kaum buruh untuk bersatu melawan kapitalisme demi memperjuangkan hak-hak mereka.

Prospek organisasi buruh dalam era globalisasi ini sudah berkembang dengan pesat dan semakin intens menangani permasalahan perburuhan, seperti apa yang dilakukan oleh ILO. LeGrain (2003: 37) menyatakan bahwa sebenarnya globalisasi memberikan pembagian kerja yang lebih baik bagi buruh dan teknologi yang membantu banyak dalam pemasukan keuntungan. Sehingga kehadiran dari organisasi internasional yang menangani permasalahan buruh akan semakin sangat diperlukan, karena melalui organisasi inilah suara-suara atau aspirasi dari para pekerja bisa diangkat ke level domestik maupun internasional. Semakin intensnya perkembangan dari kapitalisme global juga harus diiringi dengan dedikasi tinggi dari kaum buruh atas pekerjaannya, sebagai bentuk rasa

terima kasih pada globalisasi yang telah memberikan segala kemudahan bagi keberlangsungan kehidupan mereka.

Permasalahan mengenai buruh ini diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**UU Ketenagakerjaan**) pada Bab 10 mengatur tentang Pengupahan. Menurut Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Hampir di semua negara saat ini, problem ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. Umumnya, negara maju berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan ‘mahalnya’ gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, dan sosial, bahkan politis.

Sementara itu, di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial nyaris tidak ada. Belum lagi perlakuan pengusaha yang merugikan pekerja, seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab, beribadah, dan lain-lain.

Adapun, berbagai problem yang menyangkut hak-hak kaum buruh tidak terselesaikan dengan baik. Lebih ironis lagi, pemerintah dengan aparat keamannya bertindak represif menekan gerakan buruh untuk meraih hak-haknya. Berikut ini adalah beberapa problem yang berhubungan dengan ketenagakerjaaan.

Polemik demo buruh ini tidak saja hanya terjadi di Ibukota DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tetapi terjadi juga dibeberpa daerah di Indonesia. Di Jawa Barat, kaum buruh menyuarakan aspirasinya di gedung sekretariatan DPRD Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Permasalahan ketenagakerjaan ini merupakan fokus pengkajian dan tanggung jawab Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat.

Bertolak dari paparan diatas, Humas & Protokoler DPRD Provinsi Jawa Barat Sub Bagian Layanan Aspirasi mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kehumasan yang berkaitan dengan pelayanan aspirasi. Layanan aspirasi ini merupakan kegiatan eksternal Humas&Protokoler sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Humas menjadi mediator antara masyarakat penyalur aspirasi dengan lembaga pemerintah yakni Komisi E DPRD Provinsi Jawa Barat. Maka, Humas & Protokoler DPRD Provinsi Jawa

Barat dituntut untuk memiliki strategi dalam menanggapi aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langung. Jelas bahwa Humas tidak dapat dipisahkan dari publik *opinion* (opini publik) atau aspirasi masyarakat, terutama hubungan dengan berbagai publik dan mengatur kesejahteraan dan keamanan tiap warga negara.

Berkaitan dengan paparan diatas, pada tanggal 01 Mei merupakan hari peringatan Buruh sedunia, atau lebih dikenal dengan "Mayday". Mayday selalu diperingati dengan turunnya seluruh buruh di Indonesia untuk menyuarakan aspirasi demi kesejahteraan kaun buruh di Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2013, atau yang dikenal dengan sebutan Mayday, sejumlah elemen buruh dan serikat pekerja menyiapkan berbagai tuntutan. Aksi demo pun bakal dilakukan di berbagai daerah secara serentak pada hari tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebuty,maka rumusan masaklah iniu adalah sebagfai berikut : **STRATEGI HUMAS DAN PROTOKOLER DPRD PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENANGGAPI ASPIRASI PESERTA DEMO BURUH**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk memberi arah pada penelitian ini, maka disusun beberapa identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *fact finding* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?
2. Bagaimana *Planning* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?

3. Bagaimana *Communication*Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?
4. Bagaimana *Evaluating* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?
5. Bagaimana Strategi Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan *fact finding, Planning, Communincation, Evaluation,* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Menanggapi Aspirasi Masyarakat Peserta Demo Buruh.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *fact finding* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh.
2. Untuk mengetahui *Planning*Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh.

3. Untuk mengetahui *Communication*Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh.
4. Untuk mengetahui *Evaluation* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh.
5. Untuk mengetahui Strategi Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi dua, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi di bidang kehumasan, terutama mengenai strategi Humas & Protokoler dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan literatur bagi mahasiswa lainnya pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Kegunaan bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuat Peneliti lebih memahami startegi Humas secara lebih mendalam, khususnya mengenai penanganan aspirasi peserta demo buruh. Dan dapat menambah pengalaman bagi Peneliti mengenai profesi Humas dalam suatu instansi Pemerintah.

2. Kegunaan bagu Universitas

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan literatur tentang strategi Humas dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh, bagi universitas, khususnya program studi *Public Relations*.

3. Kegunaan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

   Penelitian ini bagi instansi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang strategi Humas & Protokoler dalam menanggapi peserta demo buruh.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut Kriyanto (2006), manfaat kerangka teoritis adalah memberikan arah bagi proses penelitian dan terbentuknya persepsi yang sama antara penelitian dan terbentuknya persepsi yang sama antara peneliti dan orang lain (yang membaca) terhadap alur-alur berfikir peneliti, dalam rangka membentuk hipotesis riset secara logis (Kriyanto, 2006:79).

Sebagai landasan untuk memecahkan masalah yang telah ditemukan, peneliti memerlukan kerangka pemikiran yang berupa teori atau pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya, yaitu teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Rencana jangka panjang ini lah yang menjadi pegangan bagi seorang Humas untuk menyusun berbagai rencana teknis, dan langkah komunikasi yang akan diambil sehari-hari. Untuk dapat bertindak secara strategis, kegiatan Humas harus menyatu dengan visi dan misi organisasinya, yakni alasan organisasi atau instansi untuk tetap hidup. Dari sini lah seorang praktisi Humas dapat menetapkan *objective*-nya dan bekerja berdasarkan *objective* tersebut.

Seperti apa yang diungkapkan oleh Jim Lukaszewski dalam Cutlip, Center, & Broom (2005), bahwa Strategi adalah tenaga penggerak dalam setiap bisnis atau organisasi. Adalah kekuatan intelektual yang membantu mengoganisasi, memprioritaskan, dan memberdayakan apa yang mereka kerjakan. Tanpa strategi, tidak ada energi. Tanpa strategi, tidak ada arah. Tanpa strategi, tidak ada momentum. Dan tanpa strategi, tidak ada dampak (Cutlip, Center & Broom;2005:291)

Pada penelitian ini untuk mengetahui strategi Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa barat, Peneliti menggunakan strategi Humas menurut Cutlip & Center(1961), yang dikutip dalam Rhenald Kasali (2005), dimana strategi merupakan rencana jangka panjang suatu perusahaan atau

instansi. Dan untuk mencapai efek yang tinggi dalam strategi Humas haruslah melalui empat tahapan, diantaranya adalah :

1. *Fact Finding*

Fact finding adalah pengumpulan data sesuai dengan kenyataan yang ada. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini masyarakat terhadap suatu instansi. Kegiatan *Fact-Finding* diharapkan bahwa manajemen akan mengetahui gambaran yang objektif tentang lembaganya dimata masyarakat. Gambaran yang objektif ini hanya bisa didapatkan melalui *research* akan dimanfaatkan sebagai landasankegiatan manajemen untuk kegiatan komunikasi yang akan di lakukan oleh humas. Hasilnya berupa dokumentasi, data-data terbuka (secara sosial dapat dilihat) *Fact-Finding* merupakan pedoman manajemen secara keseluruhan.

Fact finding merupakan mendefinisikan masalah. Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku mereka yang peduli dan terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Intinya ini merupakan fungsi kecerdasan organisasi. Langkah ini memberi landasan bagi semua langkah proses pemecahan masalah lainnya dengan menentukan " apa yang sedang terjadi saat ini "(Kasali, 2005:84).

2. *Planning*

Yaitu tahap merencanakan dan membuat program sesuai dengan apa yang telah diketahui dalam tahap *Fact-Finding*. *Planning* merupakan segala informasi atau data masukan atau input yang diperoleh berkaitan dengan hal

atau permasalahan yang dihadapi kedalam bentuk rencana tindakan untuk pemecahannya.

Perencanaan humas merupakan suatu proses berkesinambungan dan selalu memerlukan peninjauan agar tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang di tetapkan. Sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan program antara lain: sifat waktu dan lingkungan. Perencanaan juga harus memperhatikan situasi di dalam maupun di luar pemerintahan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Definisi lain dari perencanaan adalah campuran dari kebijakan dan tata cara (prosedur) sedangkan kegiatan secara sederhana yaitu acara atau susunan acara, sedangkan secara *Public Relations* yaitu perincian waktu atau *timming* secara teratur, dan menurut urutan tertentu tentang pelaksanaan langkah demi langkahsesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada perencanaan. (Cultip, Center & Broom, 2005: 263-273).

Pada tahap ini seorang praktisi Humas sudah menemukan penyebab timbulnya permasalahan dan sudah siap dengan langkah-langkah pemecahan atau pencegahan. Langkah-langkah itu dirumuskan dalam bentuk rencana, prosedur dan program, termasuk anggarannya. (Kasali, 2005:85)

3. *Communicating*

Communicating merupakan tahap implementasi atau pelaksanaan sesuai fakta/data yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Misalnya dengan melakukan “operasinya” atau mengkomunikasikan sesuai dengan bentuk-bentuk komunikasi:

1. *Personal communication*
2. *Group communication*
3. *Mass communication*

Pada tahap ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

1. *The action of strategy* : Humas harus dapat melakukan tindakan yang sifatnya *acting responsively* dan *responsibility*, artinya Humas mau mendengar keinginan publik sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan.
2. *The communication of strategy* : mempertimbangkan seluruh komponen komunikasi yang dilaksanakan dimulai pada saat menggunakan media, menggunakan sumber komunikasi, membawa komunikan ke arah yang lebih diinginkan, memodifikasi pesan yang disampaikan sesuai kerangka pesan yang baik, dan dapat menggiring opini publik, sikap, dan perilaku publik yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya komponen-komponen komunikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pemrograman (Abdurrachman, 2001 : 33).

Communicating merupakan pelaksanaan program atau aksi dan komunikasi, dimana rencana program yang telah ditetapkan atau diimplementasikan ke dalam suatu bentuk program aksi dan komunikasi sebagai bentuk langkah nyata pemecahan masalah Humas yang sedang dihadapi. Aksi dan komunikasi ini dapat berupa program tindakan maupun program komunikasi yang kesemuanya merupakan cara atau proses untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Tahap ini akan menjawab tentang isi pesan, bentuk pesan dan media yang digunakan praktisi Humas dan menjalani strategi (Kasali, 2005:85)

3. Evaluating

Mengadakan evaluasi tentang sesuatu kegiatan adalah perlu untuk menilai apakah tujuan itu sudah tercapai, atau perlu menggunakan cara-cara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap cara yang dilakukan oleh badan/instansi perlu dinilai untuk kemudian dijadikan dasar dalam menentukan suatu kegiatan atau tindakan. Evaluasi mengenai cara-cara yang dilaksanakan secara *countinue* dapat dilakukan secara periodik.

Proses Humas selalu dimulai dari mengumpulkan fakta dan diakhiri pula dengan pengumpulan fakta. Untuk mengetahui apakah prosesnya sudah selesai atau belum, seorang Humas perlu melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah diambil (Kasali, 2005:85)

Fungsi Humas dalam suatu organisasi terutama difungsikan untuk menunjang fungsi-fungsi manajemen perusahaan/instansi untuk mencapai tujuan bersama. Adanya berbagai kemajuan telah mengakibatkan terjadinya pembaruan dalam masyarakat. Cara hidup masyarakat yang semakin modern dalam bidang-bidang tertentu, semakin mempengaruhi fungsi tersebut. Kondisi diatas jelas memerlukan keahlian khusus di bidang Humas.

Praktisi Humas dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan atau mengelola pemanfaatan sumber daya organisasi untuk penyelenggaraan komunikasi kedua arah antara organisasi dan publiknya. Pada dasarnya tujuan

sentral Humas untuk menunjang manajemen yang berupaya mencapai tujuan organisasi atau Instansi tersebut.

Dari penyataan tersebut manajemen Humas dipahami sebagai bentuk pengelolaan Humas dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen terhadap program yang dijalankan, yakni misalnya Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh sebagai bentuk kegiatan Humas&Protokoler terhadap publik eksternalnya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, akan mengaplikasikan teori yang digunakan sebagai landasan penelitian dengan keadaan yang ada di lapangan. Landasan teori yang digunakan adalah Strategi Humas menurut Cultip & Center (1961) yang dikutip oleh Kasali (2005) peneliti mengaplikasikannya kedalam masalah penelitian, yaitu :

1. *Fact finding*

Fact finding atau pencarian fakta ini yang dilakukan oleh Humas & Protokoler Sub Bagian layanan aspirasi dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh. Dalam hal ini Humas & Protokoler Sub bagian layana aspirasi sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, mencari data dan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan kenyataan, kemudian diolah menjadi bentuk informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dari program yang akan dijalankan.

Pada tahap ini, bagian Humas & Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi aspirasi peserta demo buruh melalui sub

bagian layanan aspirasiadalah berusaha mencari keterangan yang merupakan data faktual. Data tersebut diolah terlebih dahulu, sehingga memperoleh kesimpulan atas kebenaran data yang diperoleh itu.

2. *Planning*

Dalam tahap ini bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi aspirasi publik adalah melakukan sebuah daftar penyusunan perencanaan dari hasil data atau fakta yang diperoleh. Dalam perencanaan tersebut ada kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pada saat pelaksanaan kegiatandalam memfasilitasi aspirasi publik. Dengan adanya daftar tersebut akan dapat dilakukan pemikiran dengan cepat untuk mengatasinya dan nantinya perencanaan itu perlu di pikirkan dengan matang, oleh karena itu kegiatan ini merupakan salah satu tahap yang turut menentukan suksesnya pekerjaan bagian Humas keseluruhan.

Perencanaan ini berisikan segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Humas & Protokoler Sub Bagian Layanan Aspirasi sekretatariat DPRD Provinsi Jawa Barat, yang masih membutuhkan penyesuaian dengan data dan fakta yang ada di lapangan, sehingga yang disusun menjadi matang dan tepat sasaran.

3. *Communcating*

Tahap *communicatng* yang dilakukan oleh Humas dan Protokol Sub bagian layanan aspirasi sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi aspirasi publik pesertademo buruh adalah dengan melakukan

implementasi dalam kegiatan tersebut sehingga komunikasipun berlangsung dengan sendirinya.

4. *Evaluation*

Evaluasi adalah tahap terakhir setelah tahap-tahap *fact finding*, *Planning*, *Communication*. Tidak jarang perubahan suatu program yang telah direncanakan akan memberikan dampak yang positif atau negatif, untuk langkah selanjutnya dalam setiap tahap program harus fleksibel demi kelancaran kegiatan yang dilakukan.

Dalam tahap ini, Humas & Protokol sub bagian layanan aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung yang akan diterapkan pada saat pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat di Daerah, merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan DPRD sebagai Bahan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, kedudukan DPRD ini dikuatkan dalam UU No. 22 Tahun 2003.

Adapun tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD terhadap penanganan aspirasi berdasar UU No. 32 Tahun 2004, susunan dan kedudukan MPR/DPR/DPRD (UU No. 22 Tahun 2003) adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

2. DPRD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintah, dan pembangunan;
3. Pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRD;
4. DPRD mempunyai kewajiban "memperhatikan"dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan msyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Dalam menindaklanjuti pemenuhan aspirasi masyarakat, tidak lepas dari aktivitas peranan struktur, prosedur dalam kerangka sistem pemerintahan daerah, juga tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi, bagaimana menampung dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi antar unit kerja agar tercipta suatu sistem pemenuhan aspirasi dalam prosedur sistem pemerintahan daerah, yang umpan baliknya dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat, dan yang tidak kalah penting adalah integritas dan kemampuan anggota DPRD dalam memahami dan menampung keinginan dan aspirasi rakyat.

Salah satu aspirasi yang sering di tuntuk oleh peserta demo atau masyarakat adalah mengenai ketenagakerjaan, yakni polemik berkepanjangan kaum buruh di Indonesia. Hampir setiap tahunnya, tepat setiap 01 Mei, kaum

buruh di indonesia yang terkabung di Serikat Buruh Indonesia menyuarakan aspirasinya ke gedung sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya polemik kaun buruh ini tidak hanya terjadi di daerah Jawa Barat saja, tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Meyuarakan aspirasi kini sudah disahkan oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, tetapi tetap harus berdasarkan peraturan atau rambu-rambu yang telah disepakati bersama.

Di dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya DPRD Provinsi Jawa Barat di bantu oleh sekretariat Humas& Protokoler. Adapun Humas & Protokoler ini memiliki sub- sub bagian diantaranya Sub bagian layanan aspirasi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan layanan hubungan DPRD dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyrakatan serta memfasilitasi layanan aspirasi.

1.6 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bertujuan dapat memberikan sebuah arahan pada penelitian. Peneliti mengembangkan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka kepada subjek penelitian.

Dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. **Bagaimana *Fact Finding* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?**

a. Bagaimana Humas & Protokoler sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan terhadap opini dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?
b. Bagaimana Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan terhadap pengetahuan dalam menanggapi aspirasi pererta demo buruh?
c. Bagaimana Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan terhadap sikap & perilaku dalam menanggapi aspirasi pererta demo buruh?
d. Bagaimana Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan terhadap pendidikan dalam menanggapi aspirasi pererta demo buruh?

2. Bagaimana *Planning* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat ?

a. Bagaimana prosedur Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada proses *planning* dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?
b. Proses perencanaan seperti apakah yang dilakukan Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi perserta demo buruh?
c. Bagaimana penentuan waktu dalam perencanaan Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada proses *planning* dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?

d. Bagaimana penentuan kegiatan dalam perencanaan Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada proses *planning* dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?
e. Bagaimana penentuan anggaran dalam perencanaan Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat pada proses *planning* dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh ?

3. **Bagaimana *Communication* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?**
   a. Bagaimana pesan yang diterima oleh Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?
   b. Bentuk pesan seperti apa yang dihasilkan dari proses komunikasi Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?
   c. Media apakah yang digunakan oleh Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?
4. **Bagaimana *Evaluation* Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?**
   a. Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan oleh Humas & Protokoler Sekretariat Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?

b. Bagaimana apabila terdapat faktor-faktor kegagalan yang dihasilkan dari proses evaluasi yang dilakukan oleh Humas & Protokoler Sekretariat Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?
c. Setelah melakukan evaluasi langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor kegagalan untuk menentukan strategi Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selanjutnya dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh?

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci.

Adapun definisi penelitian kualitatif menurut **Bogdan dan Taylor** yang dikutip dalam Moleong (2004:4):

"Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati" (Moleong, 2004:4), sedangkan Metode Deskriptif adalah manfsirkan dan menuturkan data yang ada kemudian dianalisis, sebagaimana dikemukakan oleh Jalaludin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Komunikasi deskriptif analisis sebagai berikut :

> "..... Suatu metode yang membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menuliskan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis serta mengambil kesimpulan dari masalah yang dibahas.

> Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi “ (Rakhmat, 2009:24).

Melalui metode deskriptif, peneliti akan menggambarkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data-data yang dimaksud sebagai suatu proses analisis untuk mencari relevansi dari daya yang diperoleh, yang mendeskriptifkan mengenai Strategi Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menanggapi aspirasi peserta demo buruh.

1.8 Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data

1.8.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, maka Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti :

1. **Wawancara (Interview)**

   Menurut **Berger dalam Kriyantono** “ Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek” (Berger dalam Kriyantono, 2009:96). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperolah informasi langsung dari sumbernya, dengan narasumber yang berjumlah 3 orang, yakni terdiri dari narasumber yang berasal dari Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Kepala Humas & Protokoler Sekretariat

DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu (1 orang) dan Kepala Sub Bagian layanan aspirasi, (1 orang). Dan *Key Informan* atau narasumber yang berasal dari publik eksternal yang diwakili oleh Kepala Serikat Buruh (1 orang), sebagai perwakilan dari peserta demo buruh.

2. **Studi Pustaka**

   Untuk melengkapi data yang sudah didapat, Peneliti menggunakan referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang akan Peneliti bahas, yaitu dengan membaca buku-buku, literatur-literatur maupun majalah-majalah yang ada hubungannya dengan kegiatan Hubungan Masyarakat. Penelitian ini mempunyai maksud yakni untuk memperolah data sekunder. Selain studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh telaah teori-teori komunikasi, Hubungan Masyarakat dan teori-teori pendukung yang dapat memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

3. **Dokumentasi**

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian.

4. **Observasi**

   Observasi merupakan melakukan peninjaun atau pengamatan secara langsung untuk mengetahui permasalahan dan objek penelitian.

1.8.2 Analisis data

Analisa data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan.

Definisi analisis data menurut **Sugiyono** dalam buku "*Memahami Penelitian Kualitatif"* antara lain :

> "Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sitesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain" (Sugiyono, 2005:89)

Analisis data dilakukan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menerapkan konsep dari **Miles and Huberman** (1984) (dalam Sugiyono, 2005:89), yang terdiri dari :

a. ***Data colletion***, merupakan kegiatan pengumpulan data-data yang ada terlebih dahulu.
b. ***Data reduction***, merupakan kegiatan mereduksi data yang diperoleh setelah dilakukan pengumpulan dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membunag data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data.
c. ***Data Display,*** merupakan kegiatan memperlihatkan data yang diperoleh setelah direduksi terlebih dahulu.
d. ***Conclusion drawing (verification),*** merupakan kegiatan membuat kesimpulan dngan menggambarkan atau memverifikasi data-data yang diperoleh.

1.9 Subjek Penelitian Dan Informan

1.9.1 Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah tempat untuk memperoleh keterangan penelitian, yakni Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dengan sumber keterangan atau informasi yang diperoleh dari divisi Humas & Protokoler Sub Bagian Layanan Aspirasi.

Sebagaimana yang dijelaskan pada metode penelitian bahwa penelitian ini adalah kualitatif, sehingga kuantitas subjek penelitian bukanlah hal yang utama. Effendy dalam bukunya Penelitian Survey, menyatakan bahwa "Subjek penelitian merupakan bagian terkecil dari suatu lembaga yang dijadikan subjek/sasaran dalam penelitian deskriptif" (Singarimbun dan Effendy, 1989:108). Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 18 orang. Dan untuk lebih jelaskan akan dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Subjek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	DRA. Hj. Siti Nina Nurasida	Kepala Bagian Humas & Protokoler
2	Drs. Ari Harmedi Memed	Kepala Sub Bagian Protokoler
3	Nanang Saefudin,S.Sos	Kepala Sub Bagian Publikasi
4	Drs. Sudiana	Kasubag Humas bagian layanan Aspirasi
5	H,Tb. AmanRusli	Pembawa Acara
6	Heni Margawati,S.ip	Petugas Protokoler
7	Ucunuraini,SS	Petugas Protokoler

8	Kanila, SAP	Petugas Protokoler
9	Yeni Septiani,A,md	PembawaAcara
10	Tjuju Aspianti	Pengumpulan & Pengelola Kliping
11	Utti Kaniawati, S,Sos	Puhlatabahan Publikasi
12	Anne Dwi Swining, S.Md	Pengumpulan & Pengelolahan Kliping
13	Syaefudin Haris Kusumah	BPP
14	Edih Suryatni	Petugas Humas & Layanan Aspirasi
15	Ir, R. Nungkeu Rodtjati, MP	Pemroses Masalah Aspirasi
16	Jeri Heryanto	Petugas Humas & Layanan Aspirasi
17	Atang Komarudin	Petugas Humas & LayananAspirasi
18	Taufik Harjana	BPP

Sumber : Company Profile Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat 2013

1.9.2 Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. "Dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, sebagai individu yang sangat penting". Informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian. (HB Sutopo 2002:50)

Dari pendapat yang dikemukan tersebut, dan mengacu pada jumlah total subjek penelitian yang diperoleh, maka teknik penarikan informan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Dimana *purposive sampling* adalah "suatu teknik penarikan sampel dengan cara memilih orang-orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu mewakili statistik, tingkat signifikansi, dan prosedur pengujian hipotesis" (Rakhmat, 2009:97).

Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang, yakni satu orang Kepala Humas & Protokoler Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, satu orang Kepala Sub Bagian Layanan Aspirasi, dan satu bagian pemproses aspirasi, karena yang paling mengetahui dan dapat memberikan keterangan dan informasi untuk penelitian ini. Selain itu terdapat informan kunci (*Key Informan*) pada penelitian ini, yang berjumlah satu orang. Informan kunci berasal dari Serikat Buruh Indonesia dimana mereka adalah perwakilan peserta demo hari buruh di gedung sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun keterangan lebih jelas mengenai informan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ibu Dra.Hj. Siti Nina N.	Kepala Humas dan Protokoler
2	Sudiana, S. Sos M.Si	Kepala Sub Bagian Layanan Aspirasi
3	Ir, R. Nungkeu Rodtjati, MP	Staff layanan aspirasi
	Jumlah	**3**

Sumber : Data Penelitian 2013

Keterangan :

1. Ibu Dra.Hj. Siti Nina N..sebagai Kepala Humas dan Protokoler diperlukan peneliti karena sumber merupakan bagian penting karena mengetahui informasi secara detail
2. Bapak Sudiana, S.Sos,M.Si sebagai informan Kepala Bagian aspirasi diperlukan oleh peneliti sebagai sumber untuk mengetahui secara global tentang Asprasi Peserta Demo.

3. Ibu Ir. R. Nungkeu Rodtjati, MP. Sebagai informan yang mewakili Staff layanan aspirasi, sebagai sumber untuk memperoleh informasi mengenai demo buruh di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.3

***Key informan* Peneltian**

No	Nama	Jabatan
1	Abdul Nafis	Ketua Serikat Buruh Indonesia (Perwakilan Buruh Jawa Barat)
	Jumlah	**1**

Sumber : Data Penelitian 2013

1) Bapak Abdul Nafis merupakan kepala serikat buruh Indonesia, Beliau menjadi perwakilan buruh Jawa Barat sejak 2010.

1.10 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.10.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Bagian Hubungan Masyarakat& Protokoler Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22 Bandung 40115.

1.10.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini, dilaksanakan pada bulan Mei- Juli 2013. Berikut rincian waktu penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

No	Uraian	April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Persiapan :** a. Pengajuan Judul																
	b. Studi pendahuluan																

	c. Persetujuan Dosen Pembimbing				■												
2	**Pelaksanaan :** a. Bimbingan bab 1			■	■	■	■										
	b. Bimbingan bab 2							■	■	■							
	c. Bimbingan bab 3							■	■	■							
	d. Penyusunan wawancara penelitian									■							
	e. Wawancara penelitian										■	■					
3	**Pengolahan data :** a. Bimbingan Bab 4											■	■	■	■		
	b. Bimbingan bab 5 c. Penyusunan keseluruhan													■	■	■	
4	**Sidang** a. Penyerahan draf tugas akhir													■			
	b. Pelaksanaan sidang tugas akhir														■		

Sumber : Data Penelitian 2013

1.11 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, subjek penelitian dan informan, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini, berisikan mengenai teori-teori dan definisi-definisi yang dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitiannya dan mencapai tujuan penelitiannya. Antara lain tinjauan mengenai tinjauan tentang Komunikasi, tinjauan tentang Hubungan Masyarakat, tinjauan tentang Aspirasi dan tinjauan tentang buruh.

BAB III : OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang sejarah instansi tempat dilakukannya penelitian, Divisi Humas, serta menjelaskan tugas pokok dan fungsi, logo instansi dan struktur organisasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari deskriptif informan, deskirptif hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, akan berisikan mengenai kesimpulan dan saran penelitian yang dibuat dalam bentuk point-point.